MINIRISET

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI DESA SERUT, BOYOLANGU, TULUNGAGUNG**

Oleh:

- 1. Nama : Mariatul Khtiayah
Npm : 1760302100093**
- 2. Nama : Intan Putri Winata
Npm : 1960302100008**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TULUNGAGUNG
Tahun Ajaran 2021/2022**

ABSTRAKSI

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besarkah orang-orang atau masyarakat kesadaran tentang wajib pajak yang dibebankan oleh pemerintah setempat dan metode penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif dengan cara wawancara dan survey langsung. Kami mengambil beberapa data dari warga desa serut untuk kami wawancarai dan survey tentang kesadaran wajib pajak.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak khususnya untuk wilayah desa serut masih rendah dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Kata Kunci: *Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan , Kepatuhan.*

1. LATAR BELAKANG

Perpajakan Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai keberagaman budaya, adat-istiadat dan agama. Mayoritas penduduk Indonesia beragama islam sehingga pajak dan zakat sehingga dua kata hamper tidak bisa dipisahkan. Tetapi keduanya memiliki perlakuan yang berbeda. Zakat hanya dibebankan pada orang muslim saja dengan syarat dan ketentuan tertentu sedangkan pajak dibebankan kepada seluruh warga Negara Indonesia yang sudah dewasa yang telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak.

Pembayaran pajak bersifat wajib tidak ada imbalan yang langsung dirasakan oleh wajib pajak yang pembayarannya diatur oleh Undang-undang. Hal ini berbeda dengan zakat yang hanya dikenakan kepada umat muslim yang memiliki kemampuan secara finansial dan telah melebihi nisabnya. Pengertian Pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan aturan yaitu undang-undang yang pemungutannya dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat imbal balik secara langsung.

Menurut (Yusmalina, 2 Lasita, 2013) Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi versi Undang-Undang KUP ini hampir sama definisi pajak yang di kemukakan oleh Rochmat Soemitro hanya kata iuran diganti dengan istilah kontribusi yang terdengar lebih positif mengandung makna adanya partisipasi masyarakat.

Kemudian ada tambahan “bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” penambahan kata tersebut membuat istilah pajak lebih bernilai positif karena pajak dipungut untuk tujuan kesejahteraan rakyat sebagai bentuk nyata ialah dengan cara penyediaan barang dan jasa publik. Selain itu pajak di bagi mejadi dua kategori 3 kategori yaitu menurut sifat, golongan dan lembaga pemungutnya. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ciri khas pajak dibanding dengan pungutan lainnya ialah bahwa wajib pajak tidak menerima secara langsung imbal balik atas pembayarannya akan tetapi timbal balik dari pajak di terima secara kolektif .

Keadaan dimana wajib pajak mengetahui perihal pajak serta serta dalam diri wajib pajak muncul motivasi dan merasa ikhlas memenuhi kewajibannya membayar pajak serta sadar bahwa pajak adalah kewajiban untuk pelaksanaan fungsi pemerintah sebagai sarana pemerataan pendapatan. Pengertian Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajak terutangnya.

Kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataanya sekarang tidak ada orang yang secara sadar akan kewajiban pajaknya dan mengerti esensi dari pajak itu sendiri melainkan hampir sebagian orang melaksanakan kewajibannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran sangat berpotensi mengurangi kepatuhan. Ada banyak

hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah:

- a. Sebab kultural dan Historis.
- b. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat.
- c. Adanya kebocoran pada penarikan pajak.
- d. Suasana Individu, seperti belum punya uang, malas dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyuluhan dan informasi tentang perpajakan.
- b. Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.
- c. Melakukan pembaharuan dan perombakan pajak-pajak yang masih berbau kolonial.

Menurut (Musthofa, 2011) , “Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Serut,” .

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Serut?
- b. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Pembangunan (PBB)?

II. LANDASAN TEORI

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut beberapa orang definisi pajak adalah :

- a. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam (Aisyah, 2015): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
- b. Menurut (Indonesia, 2007) Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Menurut (Ratnawati & Rachmad Gesah Mukti Prabowo, 2019) Pajak merupakan sumber penerimaan Negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang”.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut beberapa orang definisi kesadaran wajib pajak adalah :

- a. Menurut (Assa et al., 2018) Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado
- b. Menurut (Kristina, 2011) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Kualitas Pelayanan .
- c. Menurut (Putri & Saleh, 2018) Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- d. Menurut (PURI, 2014) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas.

Pengertian pajak bumi dan bangunan adalah sebuah pungutan wajib yang diambil oleh pemerintah terhadap suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, perusahaan, maupun pelaku bisnis kecil dan menengah. PBB muncul sebab adanya keuntungan ekonomi yang didapatkan para pemilik bangunan, entah itu sebagai tempat tinggal atau memulai sebuah usaha. Besarannya pun pasti berbeda-beda.

- a. Menurut (Fitria, 2017) Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pbb Semarang.
- b. Menurut (Masriah, 2005) Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pbb Semarang
- c. Menurut (Lestari, 2016) Pajak Bumi dan Bangunan Perspektif Ekonomi Islam
- d. Menurut (PURI, 2014) menyatakan bahwa: “Pajak Bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan”.

Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”.

III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan survey secara langsung dan data dari metode penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif atau disebut juga data naratif, adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, data ini disebut data kualitatif deskriptif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena. Dan metode ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besarkah kesadaran wajib pajak warga desa serut yang dibebankan oleh pemerintah setempat.

Peneliti yang bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada KPP wilayah Tulungagung. Metode penelitian ini kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada KPP wilayah Tulungagung. Penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan persamaan yang lain ialah terletak pada salah satu variabel bebas yang digunakan yaitu sosialisasi perpajakan dan variabel terikatnya kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel bebas yang lain dan lokasi penelitiannya objek penelitian juga berbeda dimana dalam penelitian peneliti fokus pada wajib pajak orang pribadi pajak bumi bangunan sedangkan pada penelitian terdahulu pajak secara umum tidak terfokus pada salah satu jenis pajak.

Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan usaha yang dilakukan oleh aparat kelurahan di wilayah kecamatan Boyolangu kota Tulungagung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak aparat kelurahan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ialah dengan cara memberikan penyuluhan kepada warga, meningkatkan pelayanan, memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh membayar pajak. Metode Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang diperlukan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Wawancara (Interview) adalah mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama interview adalah kontak langsung dan bertatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi (Rachman 1999: 83). Dalam hal ini yang diwawancarai adalah: 1) Wajib pajak 2) Petugas Desa Bentuk wawancara yang digunakan adalah semi struktural dalam hal ini mula-mula menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dalam penelitian ini wajib pajak yang diwawancarai 15 wajib pajak yang diambil dari masyarakat di desa serut yang terdapat di kecamatan Boyolangu. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua.
- b. Observasi
Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
- c. Dokumentasi
Dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data melalui peningkatan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau yang lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Rachman, 1999: 96).

Persamaan penelitian ini ialah terletak pada objek penelitiannya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan perbedaannya terletak pada pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di wilayah kota Tulungagung. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kota Tulungagung, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap Zulfakhry Nashby, “Analisis Pengaruh Penerapan Sensus Pajak, Sosialisasi Pajak dan Presepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Wilayah Jakarta Selatan”, (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 2014) Muhammad Rico, “Peranan Aparatur Kelurahan dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Membayar Pajak.

IV. PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, yaitu Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Serut, Boyolangu, Tulungagung. Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara secara mendalam dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung di lapangan yang kemudian dianalisis oleh penulis. Fokus penelitian ini adalah pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di wilayah kota Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan mendapatkan realitas yang kompleks terkait masalah yang terjadi. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang didasari oleh orang atau perilaku yang diamati. Untuk tahap analisis, yang dilakukan oleh penulis adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh

penulis. Agar pembahasan lebih sistematis dan terarah maka penulis melakukan wawancara dan survey menghasilkan data sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Membayar Pajak atau tidak	Nominal
1	Rina	Ds.Serut	tidak	0
2	Rini	Ds.Serut	tidak	0
3	Sringatun	Ds.Serut	tidak	0
4	Dana	Ds.Serut	tidak	0
5	Dinda	Ds.Serut	tidak	0
6	Pradana	Ds.Serut	ya	75000
7	Kusworo	Ds.Serut	ya	50000
8	Rita	Ds.Serut	ya	65000
9	Tiara	Ds.Serut	ya	70000
10	Winarti	Ds.Serut	ya	75000
11	Tata	Ds.Serut	tidak	0
12	Rafi	Ds.Serut	tidak	0
13	Ina	Ds.Serut	tidak	0
14	Tya	Ds.Serut	tidak	0
15	Raya	Ds.Serut	tidak	0

Dari hasil data tersebut diketahui bahwa yang sadar untuk membayar wajib pajak bumi bangunan ada 5 orang dan tidak membayar wajib pajak dan bangunan ada 10 orang dari keseluruhannya. Berarti dari data tersebut menyatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak bumi bangunan di desa serut bisa dikatakan masih sangat rendah.

Dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak di desa serut antara lain:

- a. tingkat ekonomi yang masih sangat rendah
- b. kurangnya pengetahuan orang tentang pajak
- c. kebanyakan orang berfikir bahwa wajib pajak itu seperti membebani dan diminta seperti memaksa.

Dengan demikian kami mengetahui bahwa : tingkat kesadaran wajib pajak di desa serut sangat rendah karena kurangnya tingkat pengetahuan tentang pajak dan kurangnya tingkat SDM (Sumber Daya Manusia). Sebenarnya kesadaran wajib pajak itu harus lebih ditingkatkan lagi agar pendapatan dari wajib pajak itu bisa dirasakan dampaknya oleh warga desa serut jika mereka memiliki tingkat kesadaran wajib pajak lebih besar meskipun dampak dari wajib pajak tidak bisa dirasakan secara langsung dan membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Masyarakat Kecamatan Boyolangu Kota Tulungagung dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan memiliki kesadaran yang masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh :

- a. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada wajib pajak atau rakyat menyebabkan kurangnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan dirasa masih kurang optimal untuk memberikan serta mengingatkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Adanya kebocoran pada penarikan pajak menyebabkan kepercayaan wajib pajak atau menyebabkan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan menjadi menurun dikarenakan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sehingga wajib pajak merasa dirugikan dan merasa sia-sia membayar Pajak

Bumi dan Bangunan. Jika uang yang wajib pajak setorkan untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara dikorupsi oleh pegawai-pegawai atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka serta memperkaya diri dengan mengkorupsi uang dari Pajak Bumi dan Bangunan.

- c. Suasana individu (belum memiliki uang) sangat mempengaruhi kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak sadar untuk membayar sehingga SPPT akan ditPajak Bumi dan Bangunan namun mereka terhalang oleh tidak memilki uang yang lebih untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Boyolangu Kota Tulungagung, berikut upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui serta dapat menambah pengetahuan tentang manfaat serta peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dapat membantu meningkatnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dengan memberikan penghargaan dapat memotivasi wajib pajak serta Kecamatan untuk dapat lebih memaksimalkan upaya dengan pemberian penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu sehingga pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat maksimal.

Kendala-kendala yang dapat menghambat kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu :

- a. Minat wajib pajak untuk ikut penyuluhan yang dilakukan oleh petugas Kecamatan;
- b. Kenaikan beban Pajak Bumi dan Bangunan yang tiap tahun naik; dan
- c. Adanya kesalahan teknis berupa alamat yang tertera di SPPT tidak sama dengan yang kenyataannya, banyaknya SPPT sehingga menyulitkan petugas

dalam memilah-milah SPPT sesuai dengan RT ataupun RW dan banyaknya tanah dan bangunan kosong yang sudah berpindah tangan atau sudah dijual kepada pihak.

Kendala diterima sudah dijual kepada pihak lain dan pemiliknya sebelumnya tidak melaporkannya kepada pihak kecamatan sehingga sangat menyulitkan petugas dalam penyaluran SPPT.

5.2 Saran

- a. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya memberikan partisipasinya untuk ikut membangun negara dengan membayar pajak tepat waktu, untuk kepentingan dan kesejahteraan negara dan masyarakat serta memberikan masukan baik kritikan maupun solusi kepada pemerintah berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan.
- b. Untuk petugas kelurahan ataupun kecamatan dapat mengatasi kendala-kendala yang mereka hadapi serta dapat meningkatkan upaya-upaya untuk mengingatkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Untuk petugas kelurahan dan kecamatan hendaknya selalu mengingatkan wajib pajak agar tidak terlambat dalam membayar pajak melalui baliho yang terpasang di setiap kelurahan atau melakukan penyuluhan pada tiap RT.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2015). *PENGARUH PPh PASAL 21 MASA TERHADAP JUMLAH PAJAK YANG DISETOR PADA PT. DETECON ASIA-PACIFIC LTD. II*(1), 1–8.
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 516–522. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21412.2018>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Indonesia, P. R. (2007). *UU RI No. 28 Tahun 2007*.
- Kristina. (2011). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, KETEGASAN SANKSI DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK REKLAME (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)* (pp. 1–13).
- Lestari, S. (2016). *Pajak Bumi dan Bangunan Perspektif Ekonomi Islam*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/664/>
- Masriah, E. (2005). *Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pbb Semarang*.
- Musthofa, K. (2011). *Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009*. <https://lib.unnes.ac.id/10284/1/10133.pdf>

PURI, K. A. (2014). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)*. 203.

Putri, N. R., & Saleh, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Tahun 2012-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 416–430.

Ratnawati, E., & Rachmad Gesah Mukti Prabowo. (2019). *MEKANISME PEMUNGUTAN PPN dan PPnBM*. 5.

Yusmalina, 2 Lasita, 3 Fauzan Haqiqi. (2013). ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PERIODE TAHUN 2016-2018. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.